



RANGKUMAN KEYNOTE SPEECH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA ACARA RAKORNAS PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM ADIPURA PADA TANGGAL 1 FEBRUARI 2016

Isu dan permasalahan sampah di Indonesia diangkat ke tingkat Nasional dengan ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang Undang ini diharapkan mampu memberikan payung hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat



dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Penerapan Undang Undang yang telah berusia 7,5 tahun ini belum mampu mendorong penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah yang menyeluruh di Indonesia.

Data Adipura 2015 diketahui dari 357 kota dan ibukota kabupaten di Indonesia yang dipantau hanya 152 kota 43% yang TPA -nya dioperasikan *Non-Open Dumping* minimal *controlled landfill* / lahan urug terkontrol dan sisanya 205 kota 53% masih mengoperasikan TPA *Open Dumping* lahan urug terbuka. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 44 yang mensyaratkan agar 5 tahun sejak diberlakukannya UU ini semua kota/kabupaten di Indonesia sudah harus menutup TPA *Open Dumping* dan diganti dengan TPA yang dikelola sesuai ketentuan (minimal *controlled landfill*).

Dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait pengelolaan sampah pada tanggal 23 Juni 2015, Bapak Presiden Joko Widodo mengarahkan agar ada terobosan pengelolaan sampah secara terpadu dan sistemik. Arahan ini mengimplikasikan perlunya penerapan berbagai strategi dan instrument yang terpadu dan berbentuk suatu system yang dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Program Adipura merupakan salah satu instrument Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang jika benar-benar dilaksanakan dengan kaidah *Good Environmental Governance* akan berperan strategis dalam hal:

1. Mendorong Pengelolaan Sampah termasuk di dalamnya mendorong pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota terkait penyediaan dan pengoperasian TPA dengan metode minimal lahan terkontrol (*controlled landfill*).
2. Mendorong pemenuhan target nasional pengurangan dan penanganan sampah. Program Adipura ini juga diharapkan dapat menjadi instrument pendorong tercapainya target pengurangan sampah Nasional sebesar 20% pada Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Indonesia sesuai dengan penerapan amanah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Bersih Sampah 2020.
3. Mendorong penerapan system pengelolaan sampah secara terpadu di setiap kabupaten/kota. Kriteria dan indicator penilaian dalam Program Adipura telah memberikan bobot yang tinggi terhadap:



- Penerapan pengurangan sampah dari sumber
- Penerapan penanganan sampah khususnya aspek pemilahan dan pengolahan sampah, serta pengelolaan TPA.

Penerapan Program Adipura pun perlu dilakukan terobosan-terobosan baru yang mengarah pada peningkatan dampak positif dari program ini. Program Adipura harus mampu mendorong terwujudnya kota-kota di Indonesia yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan

Kota-kota yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan lingkungan. Agar dilakukan terobosan dalam Program Adipura ini untuk memastikan terintegrasinya aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di atas.

Berkenaan hal tersebut KLHK sedang melakukan penyelesaian proses Rebranding Adipura Strategy. Dimana mekanisme, kriteria, dan indikator Program Adipura saat ini sangat kental terhadap pengintegrasian aspek sosial dengan aspek lingkungan. Hal ini terlihat dari kriteria dan indikator terkait pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau

Kriteria dan indikator Program Adipura saat ini nantinya akan dimasukkan sebagai beberapa kategori, yaitu:

1. Adipura Buana, yaitu suatu kategori penilaian Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang layak huni *livable city*. Kota-kota juga harus mampu memanfaatkan potensi lingkungannya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya. Untuk menjawab hal ini, dikembangkan lagi mekanisme, kriteria dan indikator penilaian Adipura yang melihat ada tidaknya pengintegrasian aspek pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi.
2. Adipura Kirana, yaitu suatu kategori penilaian Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Trade, Tourism, and Investment TTI berbasis pengelolaan lingkungan hidup (*attractive city*).



3. Adipura Paripurna merupakan bentuk penghargaan tertinggi terhadap kota/ibukota kabupaten yang mampu memberikan kinerja terbaik untuk kedua kategori Adipura di atas, yaitu Adipura Buana dan Adipura Kirana.

Pelaksanaan Program Adipura bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja seorang Bupati/Walikota. Seorang Bupati/Walikota yang telah terbukti berkinerja secara konsisten membangun kota/kabupatennya, tidak hanya pembangunan ekonomi namun juga pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, perlu diapresiasi. Untuk itulah perlu diadakan suatu Anugerah Adipura Bhakti bagi bupati/walikota yang berprestasi ini.

Pelaksanaan Program Adipura ke depan akan kembali ke siklus periode Adipura sebelumnya yaitu dimulai dari Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan Juni hingga Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan Juni tahun berikutnya. Saya telah menugaskan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 beserta jajarannya agar mulai periode Adipura tahun 2016/2017 sudah menerapkan Mekanisme, Kriteria dan Indikator penilaian Adipura berdasarkan hasil Rebranding Adipura Strategy

Selama masa transisi sebelum dimulainya periode Adipura 2016/2017, KLHK akan melakukan pemantauan 1 P1) Program Adipura pada akhir Bulan Februari atau awal Bulan Maret 2016. Pengumuman penghargaan Adipura akan dilakukan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan Juni 2016. Namun dikarenakan belum selesainya mekanisme, kriteria dan indikator penilaian Adipura berdasarkan hasil Rebranding Adipura Strategy maka penilaian akan tetap menggunakan kriteria dan penilaian Adipura sebelumnya, ditambah kriteria dan indikator penilaian terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan.

Rakornas ini dapat memberikan masukan dan saran kepada kami untuk meningkatkan tidak hanya kinerja Program Adipura itu sendiri namun juga dampak positif dari penerapan program ini terhadap pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup perkotaan di Indonesia.

Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita
HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com
www.pelatihanlingkungan.com
www.trainingproper.com
www.limbahb3.com



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Sumber: KLH